

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Akub, M. Syukri dan Baharuddin Baharu. *Wawasan Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana (Cetakan Pertama)*. (Rangrang Education, 2012).
- Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Grasindo, 2008)
- Atmasasmita, Romli. *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. (Bandung: Bina Cipta, 1997)
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*. (Bandung: CV Mandar Maju).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1987).
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- Hamzah, Andi. *Kamus Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi II Cet.16*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua Cet.16..* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Hiariej, Eddy O.S. *Teori & Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).
- Hiariej, Eddy O. S. *Hukum Acara Pidana, Cet.4*. (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019).
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing, 2006).
- Ilyas, Amir dan Jupri. *Justice Collaborator, Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*. (Yogyakarta: GENTA Publishing, 2018).
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1989).

- Muhadar, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana*. (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Muladi dan Diah Sulistiyani. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. (Bandung: Alumni, 2016).
- Mulyadi, Lilik. *Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. (Bandung: PT Alumni, 2015).
- Ngani, Nico. *Metodelogi Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Reksodiputro, Mardjono. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*. (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993).
- Sahetapy, J. E. *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1987).
- Setiadi, Edi dan Kristian. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017).
- Soponyono, Eko. *Kapita Selekta Hukum Pidana: Kebijakan Sistem Pemidanaan Yang Berorientasi Pada Korban (Dilengkapi Dengan Bahan Kajian Perbandingan)*. (Semarang: Pohon Cahaya, 2012)
- Sudarto. *Hukum Pidana I Edisi Revisi*. (Semarang: Yayasan Sudarto, 2009).
- Suteki dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik), Cet.3*. (Depok: PT Grafindo Persada, 2020).
- Wisnubroto, Aloysius dan G. Widiartana. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. (Bandung: PT Aditya Bakti, 2005).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN KONVENSI

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

United Nations Convention Against Organized Transnational Crime (UNTOC)

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, 1 Tahun 2011, KEPB-02/01-55/12/201, 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Committee of Ministers of the Council of Europe dalam Recommendation Rec(205)9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice

Republik Albania dalam *The Assembly Law No. 9205, Dated 15/03/2004 on the Justice Collaborators and Witness Protection*

Republik Albania dalam *Criminal Code of The Republic Of Albania, Law No. 7895, Dated 27 January 1995*

Rancangan Undang Undang tentang Hukum Acara Pidana Tahun 2012

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 42/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2437 K/Pid.Sus/2011

SKRIPSI DAN TESIS

Buana, Muhammad Pandu Fajar. *Pemisahan Berkas Perkara Pidana (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Proses Pembuktian Suatu Tindak Pidana Dengan Delik Penyertaan (Studi Pada Kejaksaan Negeri Ambarawa)*. Skripsi. (Semarang: Fakultas Hukum UNNES, 2016).

Hapsari, Maria Yudithia Bayu. *Konsep dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Skripsi. (Depok: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012).

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Julianto, Bambang. *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. (Yogyakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2020).

- Kusumawardhani, Wini dan Subekti. *Upaya Perlindungan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/Tpk/2016/Pn Jkt.Pst)*. (Recidive Volume 8, 2018).
- Muharikin, Irfan Maulana. *Kedudukan Saksi Mahkota dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Asas Non Self Incrimination*. (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2015)
- Rompas, Christopher. *Pemecahan Perkara Pidana (Splitsing) sebagai Upaya untuk Mempercepat Proses Pembuktian*. (Manado: Lex Privatum Vol IV/No.2/Feb/2016, Fakultas Hukum UNSRAT).
- Yulistiyowati. *Pertanggungjawaban Pidana Kelompok Terorganisasi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Jember: Program Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember).

MAKALAH

- Sukinta. *Beberapa Perbedaan Penting Antara KUHAP dan HIR*. Makalah. (Semarang: Universitas Diponegoro, 1997).
- Sularto, R.B. *Suatu Reorientasi Dalam Studi Tentang Korban Kejahatan*. Makalah. (Semarang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1996).
- Rochaeti, Nur. *Polisi Sebagai Sub Sistem Dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Makalah. (Semarang: Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997).

WEBSITE

- Aries, Albert. *Perbedaan Saksi Mahkota dengan Justice Collaborator*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58d33e6281239/perbedaan-saksi-mahkota-dengan-ijustice-collaborator-i/>
- Council of Europe Committee of Ministers Recommendation Rec(2005)9 of the Committee of Ministers to member states on the protection of witnesses and collaborators of justice (Adopted by the Committee of Ministers on 20 April*

2005 on the 924th meeting of the Ministers' Deputies)
[https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/Rec%20 2005 9.pdf](https://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/Rec%202005_9.pdf)

Criminal Code of The Republic Of Albania, Law No. 7895, Dated 27 January 1995 <https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/al/al037en.pdf>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *RUU tentang Hukum Acara Pidana* <https://www.dpr.go.id/uu/detail/id/62>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hukum>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring,
<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

Le Sénat de la République Français, Les Repentis Face a la Justice Penale
<https://www.senat.fr/lc/lc124/lc1240.html>

Munir, Saiful. *Pakar Pidana: Status Justice Collaborator Bukan untuk Pelaku Utama*. Berita pada Sindonews.com pada Jumat, 12 Januari 2018
<https://nasional.sindonews.com/berita/1273077/13/pakar-pidana-status-justice-collaborator-bukan-untuk-pelaku-utama>

Republic of Albania, The Assembly Law No. 9205, Dated 15/03/2004 on the Justice Collaborators and Witness Protection <https://www.legal-tools.org/doc/ed5e49/pdf/>

Scribd.com, <https://www.scribd.com/doc/51106383/32/G-Metode-Analisis-Data>

Serupa.id. *Metode Penelitian Deskriptif: Pengertian, Langkah & Macam*.
<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/>

TULISAN LAIN

Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. *Modul Hukum Acara Pidana*. (Jakarta: Kejaksaan RI, 2019).